



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERNYESUAIAN PERJANJIAN KINERJA

**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN**

2023

SETKEMENKO
PMK



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Linda Restaningrum, SE, M.I.Kom
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andie Megantara, Ph.D.
Jabatan : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

1. PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
2. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi; dan
3. PIHAK PERTAMA disarankan untuk memiliki jabatan fungsional tertentu.

Jakarta, 25 Mei 2023

Pihak Kedua:
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Andie Megantara, Ph.D.

Pihak Pertama:
Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama,

Linda Restaningrum, SE, M.I.Kom

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Perencanaan dan Kerjasama
Tahun Anggaran : 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Kualitas Layanan Perencanaan dan Kerjasama	Indeks Perencanaan	5
	Nilai SAKIP	83,01
	Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran	6
	Jumlah Dokumen Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan	5
	Jumlah Dokumen Administrasi Kerjasama Luar Negeri	4
	Jumlah Dokumen Administrasi Pengelolaan Kegiatan Strategis	2

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.850.000.000,-
Layanan Manajemen Kinerja Internal	3.401.569.000,-
Jumlah Anggaran	7.251.569.000,-

Jakarta, 25 Mei 2023

Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan,



Andie Megantara, Ph.D.

Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama,



Linda Restaningrum, SE, M.I.Kom





**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Dyah Ratnawati
Jabatan : Kepala Bagian Pengelolaan Kegiatan Strategis

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Linda Restaningrum, SE, M.I.Kom
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 25 Mei 2023

Pihak Kedua:
Kepala Biro
Perencanaan dan Kerjasama,

Linda Restaningrum, SE, M.I.Kom

Pihak Pertama:
Kepala Bagian Pengelolaan Kegiatan Strategis,

Dra. Dyah Ratnawati

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Perencanaan dan Kerjasama
Tahun Anggaran : 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya kualitas layanan Pengelolaan Kegiatan Strategis Kemenko PMK	Jumlah Draft Laporan Pengelolaan Kegiatan Strategis	1
	Jumlah Draft Laporan Penanganan Isu-Isu Strategis Bidang PMK	1

Jakarta, 25 Mei 2023

Kepala Biro
Perencanaan dan Kerjasama,



Linda Restaningrum, SE, M.I.Kom

Kepala Bagian Pengelolaan Kegiatan Strategis,



Dra. Dyah Ratnawati





**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Khamim, M.Pd
Jabatan : Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andie Megantara, Ph.D.
Jabatan : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

1. PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
2. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi; dan
3. PIHAK PERTAMA disarankan untuk memiliki jabatan fungsional tertentu.

Jakarta, 25 Mei 2023

Pihak Kedua:
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Andie Megantara, Ph.D.

Pihak Pertama:
Kepala Biro Umum dan
Sumber Daya Manusia,

Dr. Khamim, M.Pd

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Umum dan Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran : 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Kualitas Layanan Umum dan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalisme ASN	78
	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Unit Setkemenko	100%
	Indeks IKPA	95,5

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Layanan Dukungan Manajemen Internal	130.847.071.000,-
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2.000.000.000,-
Layanan Manajemen SDM Internal	2.791.295.000,-
Layanan Manajemen Kinerja Internal	2.161.634.000,-
Jumlah Anggaran	137.800.000.000,-

Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan,



Andie Megantara, Ph.D.

Jakarta, 25 Mei 2023
Kepala Biro Umum dan
Sumber Daya Manusia,



Dr. Khamim, M.Pd





**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fiki Ikrom Ibrahim, SE, M.Ak
Jabatan : Kepala Bagian Rumah Tangga

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Khamim, M.Pd
Jabatan : Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 25 Mei 2023

Pihak Kedua:
Kepala Biro Umum dan
Sumber Daya Manusia,

Dr. Khamim, M.Pd

Pihak Pertama:
Kepala Bagian Rumah Tangga dan
Pengadaan,

Fiki Ikrom Ibrahim, SE, M.Ak

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Umum dan Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran : 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya Kualitas Layanan Rumah Tangga dan Pengadaan Kemenko PMK	Jumlah Draft Dokumen Rumah Tangga	1
	Jumlah Draft Dokumen Pengadaan	1

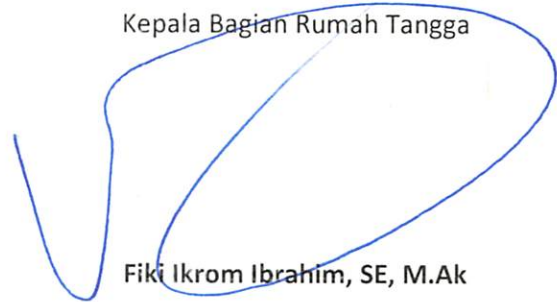
Jakarta, 25 Mei 2023

Kepala Biro Umum dan
Sumber Daya Manusia,



Dr. Khamir, M.Pd

Kepala Bagian Rumah Tangga



Fiki Ikrom Ibrahim, SE, M.Ak



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Yusuf Asnani, S.Kom
Jabatan : Kepala Subbagian Rumah Tangga

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fiki Ikrom Ibrahim, SE, M.Ak
Jabatan : Kepala Bagian Rumah Tangga

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 25 Mei 2023

Pihak Kedua:
Kepala Bagian Rumah Tangga

Fiki Ikrom Ibrahim, SE, M.Ak

Pihak Pertama:
Kepala Subbagian Rumah Tangga,

M. Yusuf Asnani, S.Kom

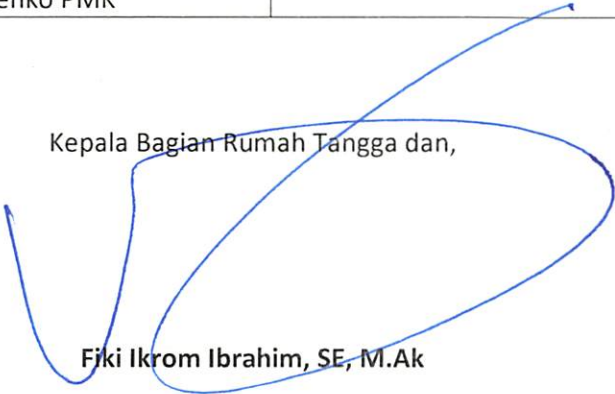
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Umum dan Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran : 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya Kualitas Layanan Rumah Tangga Kemenko PMK	Jumlah Bahan Draft Dokumen Rumah Tangga	1

Jakarta, 25 Mei 2023

Kepala Bagian Rumah Tangga dan,


Fiki Ikrom Ibrahim, SE, M.Ak

Kepala Subbagian Rumah Tangga,


M. Yusuf Asnani, S.Kom



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Wijayanti, S.Sos, M.A.
Jabatan : Kepala Subbagian Pengadaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fiki Ikrom Ibrahim, SE, M.Ak
Jabatan : Kepala Bagian Rumah Tangga

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 25 Mei 2023

Pihak Kedua:
Kepala Bagian Rumah Tangga,

Fiki Ikrom Ibrahim, SE, M.Ak

Pihak Pertama:
Kepala Subbagian Pengadaan,

Putri Wijayanti, S.Sos, M.A.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Umum dan Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran : 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Kemenko PMK	Jumlah Bahan Draft Dokumen Pengadaan	1

Kepala Bagian Rumah Tangga,

Fiki Ikrom Ibrahim, SE, M.Ak

Jakarta, 25 Mei 2023

Kepala Subbagian Pengadaan,

Putri Wijayanti, S.Sos, M.A.



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dyah Tri Kumolosari, AKS, M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andie Megantara, Ph.D.
Jabatan : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

1. PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
2. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi; dan
3. PIHAK PERTAMA disarankan untuk memiliki jabatan fungsional tertentu

Jakarta, 25 Mei 2023

Pihak Kedua:
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Andie Megantara, Ph.D.

Pihak Pertama:
Plt. Kepala Biro Hukum, Persidangan,
Organisasi, dan Komunikasi,

Dyah Tri Kumolosari, AKS, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi
Tahun Anggaran : 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Kualitas Layanan Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi	Nilai Evaluasi Kelembagaan	Peringkat Komposit 5 (Skor 61 sd 80)
Meningkatnya Tata Kelola Komunikasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	96

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Layanan Dukungan Manajemen Internal	6.700.000.000,-

Jakarta, 25 Mei 2023

Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan,


Andie Megantara, Ph.D.

Plt. Kepala Biro Hukum, Persidangan,
Organisasi, dan Komunikasi,


Dyah Tri Kumolosari, AKS, M.Si



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulfa Ruhama, S.I.P., MAIR
Jabatan : Kepala Bagian Persidangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dyah Tri Kumolosari, AKS, M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 25 Mei 2023

Pihak Kedua:
Plt. Kepala Biro
Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi,


Dyah Tri Kumolosari, AKS, M.Si

Pihak Pertama:
Kepala Bagian Persidangan,


Zulfa Ruhama, S.I.P., MAIR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi
Tahun Anggaran : 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya kualitas layanan persidangan Kemenko PMK	Jumlah Draft Dokumen Penyusunan Bahan Persidangan	1
	Jumlah Draft Dokumen Penyusunan Hasil Persidangan	1
	Jumlah Draft Dokumen Pengelolaan Data Hasil Persidangan	1

Jakarta, 25 Mei 2023

Plt. Kepala Biro
Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi,


Dyah Tri Kumolosari, AKS, M.Si

Kepala Bagian Persidangan,


Zulfa Ruhama, S.I.P., MAIR





**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Andi Rahmadi, M.Sc
Jabatan : Kepala Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andie Megantara, Ph.D.
Jabatan : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

1. PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
2. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi; dan
3. PIHAK PERTAMA disarankan untuk memiliki jabatan fungsional tertentu.

Jakarta, 25 Mei 2023

Pihak Kedua:
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Andie Megantara, Ph.D.

Pihak Pertama:
Kepala Biro Sistem Informasi dan
Pengelolaan Data,

Ir. Andi Rahmadi, M.Sc

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data
Tahun Anggaran : 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Kualitas Sistem Informasi dan Pengelolaan Data	Indeks SPBE	3,5

Klasifikasi Rincian <i>Output</i>	Anggaran (Rp)
Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.500.000.000,-

Jakarta, 25 Mei 2023

Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan,


Andie Megantara, Ph.D.

Kepala Biro Sistem Informasi dan
Pengelolaan Data,


Ir. Andi Rahmadi, M.Sc





**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Indah Suwarni, M.Si
Jabatan : Inspektur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhadjir Effendy
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 25 Mei 2023

Pihak Kedua:
Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,


Muhadjir Effendy

Pihak Pertama:
Inspektur,


Dra. Indah Suwarni, M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Inspektorat
Tahun Anggaran : 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Kualitas Layanan Pengawasan internal	Indeks Manajemen Risiko	Level 4
	Jumlah Dokumen Pengawasan Internal	8

Klasifikasi Rincian <i>Output</i>	Anggaran (Rp)
Layanan Dukungan Manajemen Internal	178.232.000,-
Layanan Manajemen Internal	621.768.000,-
Jumlah Anggaran	800.000.000,-

Jakarta, 25 Mei 2023

Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,


Muhadjir Effendy

Inspektur,


Dra. Indah Suwarni, M.Si





**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anies Kristianita Dwihening, SE
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Indah Suwarni, M.Si
Jabatan : Inspektur

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 25 Mei 2023

Pihak Kedua:
Inspektur,

Dra. Indah Suwarni, M.Si

Pihak Pertama:
Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat,

Anies Kristianita Dwihening, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Inspektorat
Tahun Anggaran : 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya Kualitas Pengawasan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Jumlah Draft Dokumen Pengawasan Internal	8

Jakarta, 25 Mei 2023

Inspektur,



Dra. Indah Suwarni, M.Si

Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat,



Anies Kristianita Dwihening, SE



KEDEPUTIAN

I



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Katiman, SE, MPP,MPA
Jabatan : Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Prof. Dr. Nunung Nuryartono
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

1. PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
2. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi; dan
3. PIHAK PERTAMA disarankan untuk memiliki jabatan fungsional tertentu.

Jakarta, 25 Mei 2023

PIHAK KEDUA:
Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kesejahteraan Sosial,

Prof. Dr. Nunung Nuryartono

PIHAK PERTAMA:
Asisten Deputi
Penanganan Kemiskinan,

Katiman, SE, MPP,MPA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan
 Tahun Anggaran : 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Penanganan Kemiskinan	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau Kebijakan dalam penyelesaian isu strategis di bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial	1
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Penanganan Kemiskinan 1. RAK Bidang Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur dan Sarana Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan bagi Masyarakat Miskin 2. RAK Bidang Sinkronisasi Data Penanganan Kemiskinan	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Penanganan Kemiskinan	Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Penanganan Kemiskinan	5,32 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Penanganan Kemiskinan	Indeks Pengendalian Program Bidang Penanganan Kemiskinan	4

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang Sosial	1.000.000.000,-
Koordinasi	700.000.000,-
Jumlah Anggaran	1.700.000.000,-

Jakarta, 25 Mei 2023

Deputi Bidang Koordinasi
 Peningkatan Kesejahteraan Sosial,



Prof. Dr. Nunung Nuryartono

Asisten Deputi
 Penanganan Kemiskinan,



Katiman, SE, MPP, MPA

KEDEPUTIAN

II



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si
Jabatan : Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Muhadjir Effendy
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 25 Mei 2023

PIHAK KEDUA:
Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

PIHAK PERTAMA:
Plt. Deputi Bidang Koordinasi
Pemerataan Pembangunan Wilayah dan
Penanggulangan Bencana,


Muhadjir Effendy


Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si

A

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH
DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana
 Tahun Anggaran : 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya implementasi kebijakan di bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana	Daerah yang Meningkatkan Pencapaian Indeks Komposit Daerah Tertinggalnya	5
	Rata-Rata Nilai Indeks Pengelolaan 52 Kawasan Transmigrasi	55,31
	Daerah yang Memiliki Rencana Penanggulangan Bencana	2
	Indeks Penanganan Konflik Sosial, Radikalisme dan Terorisme	77,08
	Indeks Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	6,5%
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana	Persentase isu-isu strategis bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana	100% (3 Isu Strategis)
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan (RK) di bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana yang dihasilkan	4
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana	Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana	5,32 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana	Indeks Pengendalian Program Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana	4
Meningkatnya efektivitas birokrasi Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana	Nilai Reformasi Birokrasi	83,51

Kegiatan	Anggaran (Rp)
Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana	13.950.000.000,-
Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	750.000.000,-
Jumlah Anggaran	14.700.000.000,-

Jakarta, 25 Mei 2023

Menteri Koordinator
 Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,


 Muhadjir Effendy

Plt. Deputi Bidang Koordinasi
 Pemerataan Pembangunan Wilayah dan
 Penanggulangan Bencana,


 Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si





**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eni Rukawiani, S.E, M.AP
Jabatan : Sekretaris Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si
Jabatan : Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

1. PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
2. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi; dan
3. PIHAK PERTAMA disarankan untuk memiliki jabatan fungsional tertentu.

Jakarta, 25 Mei 2023

PIHAK KEDUA:
Plt. Deputi Bidang Koordinasi
Pemerataan Pembangunan Wilayah dan
Penanggulangan Bencana,

Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si

PIHAK PERTAMA:
Sekretaris Deputi Bidang
Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah
dan Penanggulangan Bencana,

Eni Rukawiani, S.E, M.AP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah
dan Penanggulangan Bencana
Tahun Anggaran : 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya efektivitas birokrasi Plt. Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Program dan Anggaran Plt. Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana	4
	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Plt. Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana	2
	Indeks Profesionalisme ASN Plt. Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana	75
	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Plt. Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana	95,5

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Layanan Dukungan Manajemen Internal	337.466.000,-
Layanan Manajemen Kinerja Internal	412.534.000,-
Jumlah Anggaran	750.000.000,-

Jakarta, 25 Mei 2023

Plt. Deputy Bidang Koordinasi
Pemerataan Pembangunan Wilayah dan
Penanggulangan Bencana,



Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si

Sekretaris Deputy Bidang
Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah
dan Penanggulangan Bencana,



Eni Rukawiani, S.E, M.AP





**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ivan Syamsurizal, S.T., M.T.
Jabatan : Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si
Jabatan : Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

1. PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
2. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi; dan
3. PIHAK PERTAMA disarankan untuk memiliki jabatan fungsional tertentu.

Jakarta, 25 Mei 2023

PIHAK KEDUA:
Plt. Deputi Bidang Koordinasi
Pemerataan Pembangunan Wilayah dan
Penanggulangan Bencana,

Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si

PIHAK PERTAMA:
Asisten Deputi
Pemerataan Pembangunan Wilayah,

Dr. Ivan Syamsurizal, S.T., M.T.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah
 Tahun Anggaran : 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau Kebijakan dalam penyelesaian isu strategis di bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana	1
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah 1. RAK Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Pengembangan Kearifan Lokal dalam Pemerataan Pembangunan Wilayah 2. RAK Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Insentif dan Afirmasi dalam Kerangka Pemerataan Pembangunan Wilayah	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah	Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah	5,32 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah	Indeks Pengendalian Program Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah	4

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	900.000.000,-
Koordinasi	200.000.000,-
Jumlah Anggaran	1.100.000.000,-

Jakarta, 25 Mei 2023

Plt. Deputi Bidang Koordinasi
 Pemerataan Pembangunan Wilayah dan
 Penanggulangan Bencana,



Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si

Asisten Deputi
 Pemerataan Pembangunan Wilayah,



Dr. Ivan Syamsurizal, S.T., M.T.





**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ir. Herbert H.O Siagian, M.Sc
Jabatan : Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si
Jabatan : Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

1. PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
2. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi; dan
3. PIHAK PERTAMA disarankan untuk memiliki jabatan fungsional tertentu.

Jakarta, 25 Mei 2023

PIHAK KEDUA:
Plt. Deputi Bidang Koordinasi
Pemerataan Pembangunan Wilayah dan
Penanggulangan Bencana,

Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si

PIHAK PERTAMA:
Asisten Deputi
Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial,

Dr. Ir. Herbert H.O Siagian, M.Sc

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial
 Tahun Anggaran : 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau Kebijakan dalam penyelesaian isu strategis di bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana	1
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial 1. RAK Pemberdayaan Desa dan Kawasan 2. RAK Penguatan Konektifitas dan Mobilitas Sosial Guna Mendukung Kawasan Pusat Pertumbuhan 3. RAK Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Masyarakat Desa 4. RAK Penyediaan Fasilitas Dasar dan Inklusi Sosial	4
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial	Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial	5,32 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial	Indeks Pengendalian Program Bidang Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial	4

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	10.600.000.000,-

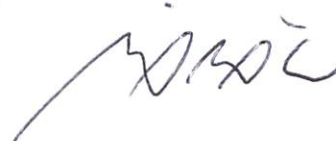
Jakarta, 25 Mei 2023

Plt. Deputi Bidang Koordinasi
 Pemerataan Pembangunan Wilayah dan
 Penanggulangan Bencana,



Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si

Asisten Deputi
 Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial



Dr. Ir. Herbert H.O. Siagian, M.Sc





**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Asril, M.Si
Jabatan : Asisten Deputi Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si
Jabatan : Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

1. PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
2. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi; dan
3. PIHAK PERTAMA disarankan untuk memiliki jabatan fungsional tertentu.

Jakarta, 25 Mei 2023

PIHAK KEDUA:
Plt. Deputi Bidang Koordinasi
Pemerataan Pembangunan Wilayah dan
Penanggulangan Bencana,

Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si

PIHAK PERTAMA:
Asisten Deputi
Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial,

Ir. Asril, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial
 Tahun Anggaran : 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau Kebijakan dalam penyelesaian isu strategis di bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana	1
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial 1. RAK Pengurangan Risiko Bencana 2. RAK Penanganan Konflik Sosial, Radikalisme dan Terorisme	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial	Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial	5,32 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial	Indeks Pengendalian Program Bidang Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial	4

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	1.000.000.000,-
Koordinasi	200.000.000,-
Jumlah Anggaran	1.200.000.000,-

Jakarta, 25 Mei 2023

Plt. Deputi Bidang Koordinasi
 Pemerataan Pembangunan Wilayah dan
 Penanggulangan Bencana,



Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si

Asisten Deputi
 Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial,



Ir. Asril, M.Si



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nelwan Harahap, S.P.
Jabatan : Asisten Deputi Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si
Jabatan : Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

1. PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
2. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi; dan
3. PIHAK PERTAMA disarankan untuk memiliki jabatan fungsional tertentu.

Jakarta, 25 Mei 2023

PIHAK KEDUA:
Plt. Deputi Bidang Koordinasi
Pemerataan Pembangunan Wilayah dan
Penanggulangan Bencana,

Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si

PIHAK PERTAMA:
Asisten Deputi
Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana,

Nelwan Harahap, S.P.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana
 Tahun Anggaran : 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau Kebijakan dalam penyelesaian isu strategis di bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana	1
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana 1. RAK Penguatan Pengerahan Sumber Daya Nasional dalam Penanggulangan Darurat Bencana 2. RAK Penguatan Manajemen Pascabencana dalam Penuntasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Masif	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana	Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana	5,32 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana	Indeks Pengendalian Program Bidang Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana	4

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	1.050.000.000,-

Jakarta, 25 Mei 2023

Plt. Deputi Bidang Koordinasi
 Pemerataan Pembangunan Wilayah dan
 Penanggulangan Bencana,



Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si

Asisten Deputi
 Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana,



Nelwan Harahap, S.P.

KEDEPUTIAN

III



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Pasli, S.STP., M.Si.
Jabatan : Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Y.B. Satya Sananugraha
Jabatan : Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

1. PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
2. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi; dan
3. PIHAK PERTAMA disarankan untuk memiliki jabatan fungsional tertentu.

Jakarta, 25 Mei 2023

PIHAK KEDUA:
Deputy Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Kesehatan dan
Pembangunan Kependudukan,

Y.B. Satya Sananugraha

PIHAK PERTAMA:
Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Kesehatan dan
Pembangunan Kependudukan,

Imam Pasli, S.STP., M.Si.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan

Tahun Anggaran : 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya efektivitas birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	Jumlah Dokumen Program dan Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	4
	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	2
	Indeks Profesionalisme ASN Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	75
	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	95,5

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Layanan Dukungan Manajemen Internal	433.340.000,-
Layanan Manajemen Kinerja Internal	466.660.000,-
Jumlah Anggaran	900.000.000,-

Jakarta, 25 Mei 2023

Deputy Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Kesehatan dan
Pembangunan Kependudukan,



Y.B. Satya Sananugraha

Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Kesehatan dan
Pembangunan Kependudukan,



Imam Pasli, S.STP., M.Si.





**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jelsi Natalia Marampa, SKM, M.K.K.K.
Jabatan : Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Y.B. Satya Sananugraha
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

1. PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
2. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi; dan
3. PIHAK PERTAMA disarankan untuk memiliki jabatan fungsional tertentu.

Jakarta, 25 Mei 2023

PIHAK KEDUA:
Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Kesehatan dan
Pembangunan Kependudukan,

Y.B. Satya Sananugraha

PIHAK PERTAMA:
Asisten Deputi
Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan,

Jelsi Natalia Marampa, SKM, M.K.K.K.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan
 Tahun Anggaran : 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau Kebijakan dalam penyelesaian isu strategis di bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	1
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan 1. RAK Ketahanan Gizi dan Kesehatan Ibu-Anak dalam Mendukung Penurunan Stunting dan AKI-AKB 2. RAK Peningkatan Promosi Kesehatan di Semua Tatanan	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan	Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan	5,32 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan	Indeks Pengendalian Program Bidang Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan	4

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang Kesehatan	1.150.000.000,-
Koordinasi	2.750.000.000,-
Jumlah Anggaran	3.900.000.000,-

Jakarta, 25 Mei 2023

Deputi Bidang Koordinasi
 Peningkatan Kualitas Kesehatan dan
 Pembangunan Kependudukan,



Y.B. Satya Sananugraha

Asisten Deputi
 Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan,



Jelsi Natalia Marampa, SKM, M.K.K.K.





**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Nancy Dian Anggraeni, M.Epid.
Jabatan : Asisten Deputi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Y.B. Satya Sananugraha
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

1. PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
2. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi; dan
3. PIHAK PERTAMA disarankan untuk memiliki jabatan fungsional tertentu.

Jakarta, 25 Mei 2023

PIHAK KEDUA:
Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Kesehatan dan
Pembangunan Kependudukan,

Y.B. Satya Sananugraha

PIHAK PERTAMA:
Asisten Deputi
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit,

dr. Nancy Dian Anggraeni, M.Epid.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit
 Tahun Anggaran : 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau Kebijakan dalam penyelesaian isu strategis di bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	1
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit 1. RAK Pengendalian Penyakit dan Faktor Risiko 2. RAK Kesiapsiagaan dan Penanggulangan KLB/Wabah dan Kedaruratan Kesehatan	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit	Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit	5,32 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit	Indeks Pengendalian Program Bidang Pengendalian dan Penanggulanangan Penyakit	4

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang Kesehatan	1.050.000.000,-
Koordinasi	500.000.000,-
Jumlah Anggaran	1.550.000.000,-

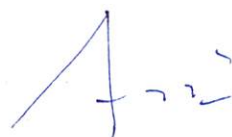
Jakarta, 25 Mei 2023

Deputi Bidang Koordinasi
 Peningkatan Kualitas Kesehatan dan
 Pembangunan Kependudukan,



Y.B. Satya Sananugraha

Asisten Deputi
 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit,



dr. Nancy Dian Anggraeni, M.Epid.





**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Redemtus Alfredo Sani Fenat, MAB
Jabatan : Asisten Deputi Peningkatan Kualitas Kependudukan dan Keluarga Berencana

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Y.B. Satya Sananugraha
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

1. PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
2. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi; dan
3. PIHAK PERTAMA disarankan untuk memiliki jabatan fungsional tertentu.

Jakarta, 25 Mei 2023

PIHAK KEDUA:
Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Kesehatan dan
Pembangunan Kependudukan,

Y.B. Satya Sananugraha

PIHAK PERTAMA:
Asisten Deputi
Peningkatan Kualitas Kependudukan dan
Keluarga Berencana,

Ir. Redemtus Alfredo Sani Fenat, MAB

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Peningkatan Kualitas Kependudukan dan Keluarga Berencana
 Tahun Anggaran : 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Peningkatan Kualitas Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau Kebijakan dalam penyelesaian isu strategis di bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	1
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Peningkatan Kualitas Kependudukan dan Keluarga Berencana 1. RAK Penguatan Kualitas Kependudukan 2. RAK Peningkatan Sinergitas Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Kualitas Kependudukan dan Keluarga Berencana	Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Kualitas Kependudukan dan Keluarga Berencana	5,32 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Kualitas Kependudukan dan Keluarga Berencana	Indeks Pengendalian Program Bidang Kualitas Kependudukan dan Keluarga Bencana	4

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang Kesehatan	1.000.000.000,-

Jakarta, 25 Mei 2023

Deputi Bidang Koordinasi
 Peningkatan Kualitas Kesehatan dan
 Pembangunan Kependudukan,



Y.B. Satya Sananugraha

Asisten Deputi
 Peningkatan Kualitas Kependudukan dan
 Keluarga Berencana,



Ir. Redemtus Alfredo Sani Fenat, MAB





**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Nia Reviani, MAPS
Jabatan : Asisten Deputi Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Y.B. Satya Sananugraha
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

1. PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
2. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi; dan
3. PIHAK PERTAMA disarankan untuk memiliki jabatan fungsional tertentu.

Jakarta, 25 Mei 2023

PIHAK KEDUA:
Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Kesehatan dan
Pembangunan Kependudukan,


Y.B. Satya Sananugraha

PIHAK PERTAMA:
Asisten Deputi
Peningkatan Pelayanan Kesehatan,


dr. Nia Reviani, MAPS



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Peningkatan Pelayanan Kesehatan
 Tahun Anggaran : 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau Kebijakan dalam penyelesaian isu strategis di bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	1
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. RAK Penguatan Transformasi Sistem Kesehatan Bidang Pelayanan Kesehatan 2. RAK Penguatan Tata Kelola Kemandirian Farmasi dan Alat Kesehatan serta Inovasi Pembiayaan Kesehatan	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Pelayanan Kesehatan	5,32 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Indeks Pengendalian Program Bidang Peningkatan Pelayanan Kesehatan	4

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang Kesehatan	1.000.000.000,-

Jakarta, 25 Mei 2023

Deputi Bidang Koordinasi
 Peningkatan Kualitas Kesehatan dan
 Pembangunan Kependudukan,



Y.B. Satya Sananugraha

Asisten Deputi
 Peningkatan Pelayanan Kesehatan,



dr. Nia Reviani, MAPS



KEDEPUTIAN

IV



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Woro Srihastuti Sulistyaningrum, ST., MIDS
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Muhadjir Effendy
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 25 Mei 2023

PIHAK KEDUA: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,	PIHAK PERTAMA: Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda,
---	---


Muhadjir Effendy


Woro Srihastuti Sulistyaningrum, ST., MIDS

A

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS ANAK, PEREMPUAN, DAN PEMUDA

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda
 Tahun Anggaran : 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya implementasi kebijakan di bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	79,39
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,17 - 91,44
	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	56,55
	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	59
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	Persentase isu-isu strategis bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	100% (3 Isu Strategis)
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan (RK) di bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda yang dihasilkan	4
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	5,32 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	Indeks Pengendalian Program Bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	4
Meningkatnya efektivitas birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	Nilai Reformasi Birokrasi	83,51

Kegiatan	Anggaran (Rp)
Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	4.600.000.000,-
Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	900.000.000,-
Jumlah Anggaran	5.500.000.000,-

Jakarta, 25 Mei 2023

Menteri Koordinator
 Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,


 Muhadjir Effendy

Deputi Bidang Koordinasi
 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda,


 Woro Srihastuti Sulistyaningrum, ST., MIDS





**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Iwan Eka Setiawan, M.Sc
Jabatan : Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Woro Srihastuti Sulistyaningrum, ST., MIDS
Jabatan : Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

1. PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
2. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi; dan
3. PIHAK PERTAMA disarankan untuk memiliki jabatan fungsional tertentu.

Jakarta, 25 Mei 2023

PIHAK KEDUA:
Deputy Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan,
dan Pemuda,

Woro Srihastuti Sulistyaningrum, ST., MIDS

PIHAK PERTAMA:
Sekretaris Deputy Bidang
Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak,
Perempuan, dan Pemuda,

Ir. Iwan Eka Setiawan, M.Sc

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda
Tahun Anggaran : 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya efektivitas birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	Jumlah Dokumen Program dan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	4
	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	2
	Indeks Profesionalisme ASN Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	78
	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	95,5

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Layanan Dukungan Manajemen Internal	465.240.000,-
Layanan Manajemen Kinerja Internal	434.760.000,-
Jumlah Anggaran	900.000.000,-

Jakarta, 25 Mei 2023

Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan,
dan Pemuda,



Woro Srihastuti Sulistyaningrum, ST., MIDS

Sekretaris Deputi Bidang
Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak,
Perempuan, dan Pemuda,



Ir. Iwan Eka Setiawan, M.Sc





**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Mustikorini Indrijatiningrum, M.E
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Woro Srihastuti Sulistyaningrum, ST., MIDS
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

1. PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
2. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi; dan
3. PIHAK PERTAMA disarankan untuk memiliki jabatan fungsional tertentu.

Jakarta, 25 Mei 2023

PIHAK KEDUA:
Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan,
dan Pemuda,

Woro Srihastuti Sulistyaningrum, ST., MIDS

PIHAK PERTAMA:
Asisten Deputi
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga,

Ir. Mustikorini Indrijatiningrum, M.E

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

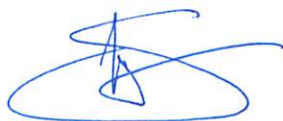
Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 Tahun Anggaran : 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau Kebijakan dalam penyelesaian isu strategis di bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	1
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 1. RAK Bidang Penguatan Ekonomi Keluarga 2. RAK Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Keluarga	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	5,32 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Indeks Pengendalian Program Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang Sosial	1.000.000.000,-

Jakarta, 25 Mei 2023

Deputi Bidang Koordinasi
 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan,
 dan Pemuda,



Woro Srihastuti Sulistyaningrum, ST., MIDS

Asisten Deputi
 Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga,



Ir. Mustikorini Indrijatiningrum, M.E



KEDEPUTIAN

V



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Gatot Hendrarto, M.Sc
Jabatan : Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Didik Suhardi, Ph.D.
Jabatan : Deputy Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga

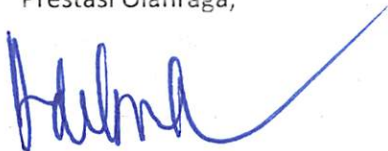
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

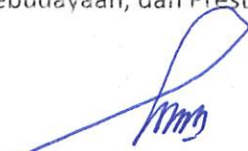
1. PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
2. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi; dan
3. PIHAK PERTAMA disarankan untuk memiliki jabatan fungsional tertentu.

Jakarta, 25 Mei 2023

PIHAK KEDUA:
Deputy Bidang Koordinasi
Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan
Prestasi Olahraga,


Didik Suhardi, Ph.D.

PIHAK PERTAMA:
Sekretaris Deputy Bidang
Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan
Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga,


Ir. Gatot Hendrarto, M.Sc



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Sekretaris Deputi Bidang koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan,
dan Prestasi Olahraga
Tahun Anggaran : 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya efektivitas birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga	Jumlah Dokumen Program dan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga	4
	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga	2
	Indeks Profesionalisme ASN Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga	78
	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga	95,5

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Layanan Dukungan Manajemen Internal	381.856.000,-
Layanan Manajemen Kinerja Internal	518.144.000,-
Jumlah Anggaran	900.000.000,-

Jakarta, 25 Mei 2023

Deputi Bidang Koordinasi
Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan
Prestasi Olahraga,



Didik Suhardi, Ph.D.

Sekretaris Deputi Bidang
Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan
Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga,



Ir. Gatot Hendrarto, M.Sc





**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Maman Wijaya, M.Pd
Jabatan : Asisten Deputi Revolusi Mental

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Didik Suhardi, Ph.D.
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

1. PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
2. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi; dan
3. PIHAK PERTAMA disarankan untuk memiliki jabatan fungsional tertentu.

Jakarta, 25 Mei 2023

PIHAK KEDUA:
Deputi Bidang Koordinasi
Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan
Prestasi Olahraga,

Didik Suhardi, Ph.D.

PIHAK PERTAMA:
Asisten Deputi
Revolusi Mental,

Dr. Maman Wijaya, M.Pd

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Revolusi Mental

Tahun Anggaran : 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Revolusi Mental	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau Kebijakan dalam penyelesaian isu strategis di bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga	1
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Revolusi Mental 1. RAK Implementasi 5 Gerakan (Melayani, Bersih, Tertib, Mandiri dan Bersatu) 2. RAK Gerakan Ayo Berkoperasi 3. RAK Peningkatan Kesadaran Bela Negara pada Generasi Muda	3
	Jumlah Dokumen Penguatan dan Pengembangan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental	1
	Jumlah Dokumen Penguatan Pusat Perubahan di tingkat Daerah	1
	Jumlah Dokumen Layanan Diseminasi Gerakan Nasional Revolusi Mental	1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Revolusi Mental	Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Revolusi Mental	5,32 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Revolusi Mental	Indeks Pengendalian Program Bidang Revolusi Mental	4

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	1.636.150.000,-
Komunikasi Publik	5.501.605.000,-
Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	21.862.245.000,-
Jumlah Anggaran	29.000.000.000,-

Deputi Bidang Koordinasi
Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan
Prestasi Olahraga,



Didik Suhardi, Ph.D.

Jakarta, 25 Mei 2023
Asisten Deputi
Revolusi Mental,



Dr. Maman Wijaya, M.Pd





**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Andre Notohamijoyo, S.Sos., MSM
Jabatan : Asisten Deputi Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Didik Suhardi, Ph.D.
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

1. PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
2. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi; dan
3. PIHAK PERTAMA disarankan untuk memiliki jabatan fungsional tertentu.

Jakarta, 25 Mei 2023

PIHAK KEDUA:
Deputi Bidang Koordinasi
Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan
Prestasi Olahraga,

Didik Suhardi, Ph.D.

PIHAK PERTAMA:
Asisten Deputi
Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan,

Dr. Andre Notohamijoyo, S.Sos., MSM

A

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan
 Tahun Anggaran : 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau Kebijakan dalam penyelesaian isu strategis di bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga	1
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan 1. RAK Pelestarian Kekayaan Budaya 2. RAK Peningkatan Pembangunan Kebudayaan	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan	Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan	5,32 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan	Indeks Pengendalian Program Bidang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan	4

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	1.000.000.000

Deputi Bidang Koordinasi
 Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan
 Prestasi Olahraga,



Didik Suhardi, Ph.D.

Jakarta, 25 Mei 2023
 Asisten Deputi
 Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan,



Dr. Andre Notohamijoyo, S.Sos., MSM

A



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Budi Prasetyo, MT
Jabatan : Asisten Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Didik Suhardi, Ph.D.
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

1. PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
2. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi; dan
3. PIHAK PERTAMA disarankan untuk memiliki jabatan fungsional tertentu.

Jakarta, 25 Mei 2023

PIHAK KEDUA:
Deputi Bidang Koordinasi
Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan
Prestasi Olahraga,

Didik Suhardi, Ph.D.

PIHAK PERTAMA:
Asisten Deputi
Peningkatan Prestasi Olahraga,

Drs. Budi Prasetyo, MT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga
 Tahun Anggaran : 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau Kebijakan dalam penyelesaian isu strategis di bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga	1
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Peningkatan Prestasi Olahraga 1. RAK Pengembangan Olahraga Masyarakat 2. RAK Penyelenggaraan Event Olahraga Nasional dan Internasional	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	5,32 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Indeks Pengendalian Program Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	4

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	1.000.000.000,-

Jakarta, 25 Mei 2023

Deputi Bidang Koordinasi
 Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan
 Prestasi Olahraga,



Didik Suhardi, Ph.D.

Asisten Deputi
 Peningkatan Prestasi Olahraga,



Drs. Budi Prasetyo, MT



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Molly Prabawaty, M.AP
Jabatan : Asisten Deputi Literasi, Inovasi, dan Kreativitas

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Didik Suhardi, Ph.D.
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

1. PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
2. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi; dan
3. PIHAK PERTAMA disarankan untuk memiliki jabatan fungsional tertentu.

Jakarta, 25 Mei 2023

PIHAK KEDUA:
Deputi Bidang Koordinasi
Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan
Prestasi Olahraga,


Didik Suhardi, Ph.D.

PIHAK PERTAMA:
Asisten Deputi
Literasi, Inovasi, dan Kreativitas,


Dra. Molly Prabawaty, M.AP



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Literasi, Inovasi, dan Kreativitas
 Tahun Anggaran : 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Literasi, Inovasi, dan Kreativitas	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau Kebijakan dalam penyelesaian isu strategis di bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga	1
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Literasi, Inovasi, dan Kreativitas 1. RAK Pengembangan Sistem Perbukuan dan Penguatan Konten Literasi 2. RAK Peningkatan Budaya Riset dan Eksperimentasi Ilmiah Sejak Usia Dini	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Literasi, Inovasi, dan Kreativitas	Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Literasi, Inovasi, dan Kreativitas	5,32 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Literasi, Inovasi, dan Kreativitas	Indeks Pengendalian Program Bidang Literasi, Inovasi dan Kreativitas	4

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	1.000.000.000,-

Jakarta, Mei 2023

Deputi Bidang Koordinasi
 Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan
 Prestasi Olahraga,



Didik Suhardi, Ph.D.

Asisten Deputi
 Literasi, Inovasi, dan Kreativitas,



Dra. Molly Prabawaty, M.AP

KEDEPUTIAN

VI



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jazziray Hartoyo, S.Sos, M.Ed, MM
Jabatan : Asisten Deputi Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Prof. Warsito, S.Si., DEA, Ph.D
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama

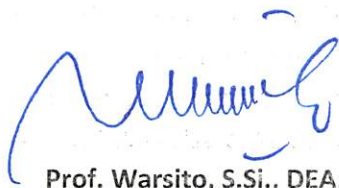
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

1. PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
2. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi; dan
3. PIHAK PERTAMA disarankan untuk memiliki jabatan fungsional tertentu.

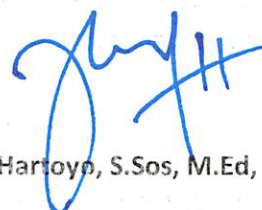
Jakarta, 25 Mei 2023

PIHAK KEDUA:
Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Pendidikan dan
Moderasi Beragama,



Prof. Warsito, S.Si., DEA, Ph.D

PIHAK PERTAMA:
Asisten Deputi
Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan
Menengah,



Jazziray Hartoyo, S.Sos, M.Ed, MM



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah
 Tahun Anggaran : 2023

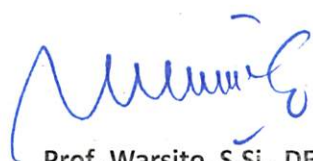
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau Kebijakan dalam penyelesaian isu strategis di bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama	1
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah 1. RAK Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 2. RAK Peningkatan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah	Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah	5,32 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah	Indeks Pengendalian Program Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah	4

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	1.000.000.000,-
Koordinasi	300.000.000,-
Jumlah Anggaran	1.300.000.000,-

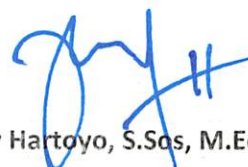
Jakarta, 25 Mei 2023

Deputi Bidang Koordinasi
 Peningkatan Kualitas Pendidikan dan
 Moderasi Beragama,

Asisten Deputi
 Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan
 Menengah,



Prof. Warsito, S.Si., DEA, Ph.D



Jazziray Hartoyo, S.Sos, M.Ed, MM





**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jazziray Hartoyo, S.Sos, M.Ed, MM
Jabatan : Plt. Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Prof. Warsito, S.Si., DEA, Ph.D
Jabatan : Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

1. PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
2. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi; dan
3. PIHAK PERTAMA disarankan untuk memiliki jabatan fungsional tertentu.

Jakarta, 25 Mei 2023

PIHAK KEDUA:
Deputy Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Pendidikan dan
Moderasi Beragama,

Prof. Warsito, S.Si., DEA, Ph.D

PIHAK PERTAMA:
Plt. Sekretaris Deputy Bidang
Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan
dan Moderasi Beragama,

Jazziray Hartoyo, S.Sos, M.Ed, MM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

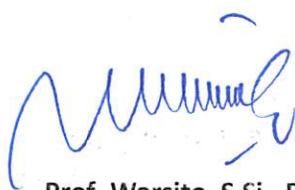
Unit Satuan Kerja : Sekretaris Deputy Bidang koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama
 Tahun Anggaran : 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya efektivitas birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama	Jumlah Dokumen Program dan Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama	4
	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama	2
	Indeks Profesionalisme ASN Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama	78
	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama	95,5

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Layanan Dukungan Manajemen Kinerja Internal	422.252.000,-
Layanan Manajemen Kinerja Internal	477.748.000,-
Jumlah Anggaran	900.000.000,-

Jakarta, 25 Mei 2023

Deputy Bidang Koordinasi
 Peningkatan Kualitas Pendidikan dan
 Moderasi Beragama,



Prof. Warsito, S.Si., DEA, Ph.D

Sekretaris Deputy Bidang
 Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan
 dan Moderasi Beragama,



Jazziray Hartoyo, S.Sos, M.Ed, MM





**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Saufi, S.Si., M.Sc.
Jabatan : Asisten Deputi Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Prof. Warsito, S.Si., DEA, Ph.D
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

1. PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
2. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi; dan
3. PIHAK PERTAMA disarankan untuk memiliki jabatan fungsional tertentu.

Jakarta, 25 Mei 2023

PIHAK KEDUA:
Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Pendidikan dan
Moderasi Beragama,

PIHAK PERTAMA:
Asisten Deputi
Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi,

Prof. Warsito, S.Si., DEA, Ph.D

Dr. Ahmad Saufi, S.Si., M.Sc.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi
 Tahun Anggaran : 2023

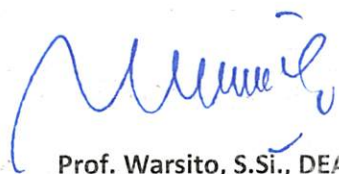
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau Kebijakan dalam penyelesaian isu strategis di bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama	1
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi 1. RAK Penyiapan Implementasi Perpres Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi 2. RAK Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi	Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi	5,32 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi	Indeks Pengendalian Program Bidang Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi	4

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	1.200.000.000,-
Koordinasi	3.162.946.000,-
Jumlah Anggaran	4.362.946.000,-

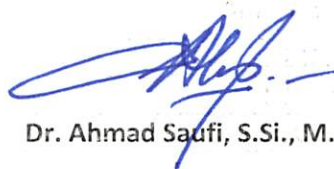
Jakarta, 25 Mei 2023

Deputi Bidang Koordinasi
 Peningkatan Kualitas Pendidikan dan
 Moderasi Beragama,

Asisten Deputi
 Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi,



Prof. Warsito, S.Si., DEA, Ph.D



Dr. Ahmad Saufi, S.Si., M.Sc.





**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Thomas Ardian Siregar, S.IP, MA.
Jabatan : Asisten Deputy Moderasi Beragama

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Prof. Warsito, S.Si., DEA, Ph.D
Jabatan : Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

1. PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
2. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi; dan
3. PIHAK PERTAMA disarankan untuk memiliki jabatan fungsional tertentu.

Jakarta, 25 Mei 2023

PIHAK KEDUA:
Deputy Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Pendidikan dan
Moderasi Beragama,

Prof. Warsito, S.Si., DEA, Ph.D

PIHAK PERTAMA:
Asisten Deputy
Moderasi Beragama,

Thomas Ardian Siregar, S.IP, MA.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Moderasi Beragama
 Tahun Anggaran : 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Moderasi Beragama	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau Kebijakan dalam penyelesaian isu strategis di bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama	1
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Moderasi Beragama 1. RAK Pemberdayaan Umat Beragama dan Layanan Agama 2. RAK Peningkatan Kerjasama Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Moderasi Beragama	Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Moderasi Beragama	5,32 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Moderasi Beragama	Indeks Pengendalian Program Bidang Moderasi Beragama	4

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	1.000.000.000,-

Jakarta, 25 Mei 2023

Deputi Bidang Koordinasi
 Peningkatan Kualitas Pendidikan dan
 Moderasi Beragama,

Asisten Deputi
 Moderasi Beragama,



Prof. Warsito, S.Si., DEA, Ph.D



Thomas Ardian Siregar, S.IP, MA.





**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Saufi, S.Si., M.Sc.
Jabatan : Plt. Asisten Deputi Pendidikan Keagamaan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Prof. Warsito, S.Si., DEA, Ph.D
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

1. PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
2. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi; dan
3. PIHAK PERTAMA disarankan untuk memiliki jabatan fungsional tertentu.

Jakarta, 25 Mei 2023

PIHAK KEDUA:
Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Pendidikan dan
Moderasi Beragama,

Prof. Warsito, S.Si., DEA, Ph.D

PIHAK PERTAMA:
Plt. Asisten Deputi
Pendidikan Keagamaan,

Dr. Ahmad Saufi, S.Si., M.Sc.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pendidikan Keagamaan
 Tahun Anggaran : 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Pendidikan Keagamaan	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau Kebijakan dalam penyelesaian isu strategis di bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama	1
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Pendidikan Keagamaan 1. RAK Peningkatan Mutu Pendidikan Keagamaan Jenjang Dasar dan Menengah 2. RAK Peningkatan Akses dan Mutu Perguruan Tinggi Keagamaan	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Keagamaan	Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Keagamaan	5,32 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Keagamaan	Indeks Pengendalian Program Bidang Pendidikan Keagamaan	4

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	1.000.000.000,-

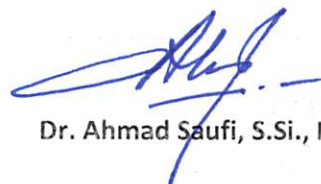
Jakarta, 25 Mei 2023

Deputi Bidang Koordinasi
 Peningkatan Kualitas Pendidikan dan
 Moderasi Beragama,

Plt. Asisten Deputi
 Pendidikan Keagamaan,



Prof. Warsito, S.Si., DEA, Ph.D



Dr. Ahmad Saufi, S.Si., M.Sc

